

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI KOTA OELAMASI NUSA TENGGARA TIMUR
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor:
4/Pid.Sus/2017/PN Olm.)**

SKRIPSI

**Oleh
Yogo Risnandri
NIM. C93216114**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
SURABAYA**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogo Risnandri

NIM : C93216114

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
/Prodi

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana
Perdagangan Orang Di Kota Oelamasi Nusa Tenggara Timur
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor:
4/Pid.Sus/2017/PN Olm.)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya
sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Maret 2020

Saya yang menyatakan



Yogo Risnandri

NIM. C93216114

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yogo Risnandri NIM.C93216114 ini telah diperiksa dan siap untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 05 Maret 2020
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final horizontal stroke.

Syamsuri, M.HI
NIP. 197210292005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yogo Risnandri NIM. C93216114 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at 19 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Syamsuri MHI
NIP. 197210292005011004

Penguji II



Prof. Dr. Sahid HM, M.Ag., M.H
NIP. 196803091996031002

Penguji III



Dr. Sri Wigati, MEI
NIP.197302212009122001

Penguji IV



Dr. Holilur Rohman, MHI
NIP.198710022015031005

Surabaya, 19 Maret 2020

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 1959040419880310



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yogo Risnandri
NIM : C93216114
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : yogo.risnandri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI KOTA OELAMASI NUSA TENGGARA TIMUR
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 4.Pid.Sus/PN Olm.)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2020

Yogo Risnandri

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Tujuan Penelitian	13
G. Kegunaan Hasil Penelitian	13
H. Definisi Operasional	14
I. Metode Penelitian	16
J. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	
A. <i>Jarimah</i> Dalam Hukum Islam	24
1. Pengertian <i>Jarimah</i>	21
2. Unsur-Unsur <i>Jarimah</i>	21
3. Turut Serta Melakukan <i>Jarimah</i>	23
4. <i>Jarimah Ta'zir</i>	27
B. Pertimbangan dan Dasar Hukum Hakim menurut Hukum Pidana Islam.....	35
C. Tindak Pidana Perdagangan Menurut Hukum Pidana Islam.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa terlahir dilengkapi dengan kemuliaan harkat dan martabat sebagai manusia. Indonesia sebagai negara yang menjunjung supremasi hukum juga turut mengakui pemenuhan jaminan harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai filosofi dasar negara, memberikan jaminan kepada warga negara untuk perlindungan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Hak hidup tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun, termasuk tidak dapat diperjualbelikan sebagaimana perdagangan manusia (*Human Trafficking*). Perdagangan manusia menjadi pemberitaan yang ramai diperbincangkan belakangan ini, lingkup dari perdagangan manusia yang tidak hanya terjadi di dalam tataran domestik tetapi juga terjadi antar negara menjadikannya sebagai kejahatan yang mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah Indonesia.

Perjalanan sejarah kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dimulai sejak zaman-zaman kerajaan yang dalam perkembangannya beratus-ratus tahun kemudian sampai pada masa kolonialisme dan imperialisme yang kemudian dikuatkan dan diikat oleh ikrar sumpah pemuda tahun 1928, akhirnya sampai pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai puncak perjuangan bangsa demi lepas dari belenggu penindasan kolonialisme dan imperialisme. Perdagangan manusia bukanlah

Perdagangan manusia yang melibatkan perempuan dan eksploitasi anak di bawah umur menjadi yang sering ditemui dalam kasus perdagangan manusia. Banyaknya kasus yang terjadi menjadikan perdagangan manusia sebagai suatu kejahatan yang memerlukan perhatian khusus,terlebih ketika kejahatan ini masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), maka diperlukan upaya yang luar biasa pula untuk menanggulangnya.

Anak sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang-orang dewasa yang berada di sekitarnya, anak tetaplah anak dengan segala ketidakmandiriannya, mereka mempunyai hak yang harus dipenuhi dalam kehidupannya sebagai seorang anak.¹ Untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perbuatan diskriminasi dan kekerasan terhadap anak, Indonesia telah mengakomodir dalam ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, undang-undang ini merupakan peraturan khusus yang mengatur masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak pun disebutkan dalam pasal 3 UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa:²

² UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keikutsertaan Indonesia dalam Protokol Palermo PBB tahun 2000 yang konsentrasi dalam mencegah, membrantas, dan menghukum tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak⁴, menjadi cikal bakal lahirnya Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berbicara mengenai perdagangan manusia erat kaitannya dengan perbudakan dan kegiatan serupa yang sudah dilarang di berbagai negara, adapun perdagangan manusia menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 yakni:

“Tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”⁵

⁵Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Zaman yang dikenal sebagai zaman *jahilliyah* (era kebodohan). Pada zaman ini manusia belum memahami adanya Allah swt yang menciptakan kehadiran manusia dalam keadaan merdeka (bebas) dan harus dihormati. Adapun saat itu kelompok-kelompok yang paling rentan akan penindasan dan penghinaan adalah anak-anak dan perempuan yang miskin, tidak jarang penindasan dilakukan oleh orang kaya dan kuat terhadap kaum lemah yang miskin, praktik ini terus terjadi dan tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran.

Perempuan rentan menjadi korban dari perbudakan dan perdagangan orang, mereka berkeyakinan bahwa kelahiran bayi perempuan di suatu keluarga dianggap menjadi aib bagi keluarga. Sehingga perempuan yang lahir disembunyikan karena di percaya akan mendatangkan kesialan, selain itu perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan, alih-alih mendapat warisan perempuan justru dijadikan sebuah obyek “barang” yang dapat di

[illegible]

manusia terancam kehilangan 5 (lima) pokok tujuan dari risalah ajaran Islam yang menjadi hak-hak dasar manusia.⁹

terdakwa sejumlah Rp 14.420.000 saat awal transaksi, sehingga selama 8 (delapan) bulan dipekerjakan di Medan dan 6 (enam) bulan dipekerjakan di Aceh, korban tidak mendapatkan gaji sepeser pun, sampai akhirnya korban dijemput oleh kepolisian resort Kupang di Aceh atas permintaan orang tua korban.

Atas kejadian itu terdakwa didakwa dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda, selain itu terdakwa berpotensi dikenai ketentuan pasal 17 Undang-undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menegaskan bahwa apabila yang menjadi korban adalah anak maka pelaku akan dikenai ancaman pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana semula.

Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap putusan hakim nomor 4/Pid.Sus/2017/PN dalam perkara perdagangan orang yang ada di Kota Oelamasi, dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Oelamasi Nusa Tenggara Timur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 4/Pid.Sus/2017/PN Olm)”.

E. Tinjauan Pustaka

- Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm, bahwa dalam pemelitan ini selain menggunakan berkas-berkas perkara yang terdapat di Pengadilan Negeri Oelamasi, serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini sebagai bahan rujukan, peneliti juga menggunakan penelitian-penelitian yang pernah ada atau penelitian terdahulu tentang masalah yang akan diteliti sehingga akan ditemukan titik perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya, kajian ini tidak termasuk kajian pengulangan atau kajian duplikat dari kajian sebelumnya, adapun penelitian yang ada relevansinya dengan tema penulis diantaranya:

- [illegible]

¹² Andi Kurnia, “Analisis Hukum Pidana Islam dan Pidana Positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr tentang Perdagangan Orang”(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 75

[illegible]

2. Sanksi

Sanksi adalah hukuman yang bersifat memaksa karena bertentangan dengan undang-undang. Penerapan sanksi dalam penelitian ini berpedoman pada ketentuan Undang-undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam hukum islam oleh beberapa ulama berpendapat dikenakan sanksi *ta'zir*.

3. Tindak pidana perdagangan orang

Tindak pidana perdagangan orang merupakan Tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.¹⁵

4. Kota Oelamasi

Mengingat bahwa sumber utama dari penelitian ini merupakan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi, maka menjadi penting bagi penulis, untuk menjelaskan kota Oelamasi. Oelamasi adalah ibu kota yang juga berperan sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oelamasi awalnya merupakan bagian dari kota

¹⁵Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1) Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*.

3) Muh. Rohis Najahan, *Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*.

5) Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*

7) Yohanes Suharudin, *“Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”*, *Jurnal Hukum Pro Justitia*

Skripsi ini merupakan penelitian yang berdasarkan kajian pustaka dengan menggunakan dokumen putusan dalam direktori putusan Mahkamah Agung, yang menurut penulis adalah sebagai berikut:

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum berbentuk berkas. Adapun penelitian ini mengambil bahan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Oelamasi,

sehingga pembahasan menjadi lebih terarah sesuai dengan bidang kajian yang diinginkan. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini yaitu:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang memaparkan secara umum tentang tindak pidana perdagangan orang menurut hukum pidana Islam. Dalam bab ini akan berisi pemaparan tentang *jarimah* dalam hukum Islam, pertimbangan dan dasar hukum hakim menurut Hukum Pidana Islam, serta tindak pidana perdagangan orang menurut Hukum Pidana Islam

Bab ketiga merupakan pembahasan mengenai deskripsi kasus secara menyeluruh mulai dari identitas terdakwa, deskripsi kasus, pembuktian, pertimbangan hakim sampai dengan amar putusan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Oelamasi nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm.

Bab keempat merupakan bagian pembahasan yang bertujuan untuk menganalisis putusan yang terdapat dalam bab 3 (tiga), dianalisis menggunakan “pisau bedah” bab dua. Dalam bab ini akan dilakukan analisis baik tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertimbangan dan dasar hukum hakim maupun tinjauan hukum pidana Islam dalam putusan Pengadilan Negeri Oelamasi nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm.

Bab kelima merupakan bab terakhir, terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah selain itu ditutup dengan saran.

BAB II

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. *Jarimah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Jarimah*

Jarimah secara bahasa dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan-perbuatan yang dipandang negatif dan tidak dibenarkan baik menurut pandangan manusia maupun pandangan allah, karena bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).¹Sedangkan menurut Imam Al Mawardi, secara istilah *jarimah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang dapat dikenakan hukuman berupa *hadd* atau *ta'zir*.

2. Unsur-unsur *Jarimah*

Setiap perbuatan akan disebut sebagai tindak pidana manakala unsur-unsur dari tindak pidana telah terpenuhi, unsur-unsur dari tindak pidana (*jarimah*) secara garis besar mempunyai 2 (dua) macam, yaitu unsur yang bersifat umum (berlaku untuk semua tindak pidana) dan unsur yang bersifat khusus (yang berlaku untuk masing-masing tindak pidana) adapun unsur-unsur dari tindak pidana atau jarimah yang bersifat umum sebagai berikut:²

¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),9

²Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 11-12

- 1) Pelaku *jarimah* melakukan kejahatannya bersama orang lain (mengambil bagiannya dalam melakukan *jarimah*), artinya tindakan pidana bersama-sama itu dilakukan secara kebetulan.
- 2) Pelaku *jarimah* mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melancarkan perbuatannya.
- 3) Pelaku menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan perbuatan *jarimah*.
- 4) Orang yang memberikan kesempatan dan bantuan dalam melancarkan perbuatan *jarimah* tanpa ikut melakukannya.

[illegible]

melakukan *jarimah*, contohnya, ada dua orang melakukan pemukulan, salah satu di antara dua orang ini memotong tangannya, sedangkan yang lain memotong lehernya. Pidana semacam ini adalah kasus pidana yang direncanakan, sehingga keduanya bertanggung jawab atas pembunuhan itu.⁶

Kejahatan ini berkaitan dengan *jarimah* zina atau perbuatan yang menuduh orang, berbuat zina atau perbuatan penghinaan. Perzinaan dapat diberikan hukuman *ta'zir* jika terdapat keraguan dalam prilakunya, objeknya maupun perbuatannya.

- 4) *Jarimah* yang berkaitan dengan harta

Jarimah yang berkaitan dengan kemaslahatan individu seperti perbuatan yang melanggar privasi orang lain, persaksian palsu, berbohong di depan persidangan dan menyakiti hewan.

- 6) *Jarimah* yang berkaitan dengan kemaslahantan umum

[illegible]

Hukuman penjara dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-habsu* yang artinya bertahan atau mencegah. Menurut Ibn Al- Qayyim *al-habsu* yaitu menahan seseorang untuk tidak melakukan kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum, baik dilakukan di rumah, masjid, tempat umum atau tempat lainnya. Hukuman pidana berupa penjara dapat berupa hukuman pokok maupun hukuman tambahan.

a) Hukuman penjara

b) Hukuman pengasingan

[illegible]

c) Memilikinya (*at-Tamlík*)

denda yang disertai dengan cambuk. Denda
dua macam, *pertama* yaitu denda y
kesempurnaanya yang berhubungan dengan
yang *kedua* denda yang tidak pasti k
berdasarkan *ijtihad* hakim sesuai dengan
pelaku kejahatan.

3. Mendengar permintaan tenaga kerja, kemudian terdakwa menghubungi saksi Antoni Nalle yang sebelumnya telah mempunyai hubungan kerjasama dalam melakukan pengiriman dan perekrutan tenaga kerja.
4. Kemudian saksi Anton Nalle menyampaikan kepada saksi Rangki Dengak dan saksi Helena Liu untuk mendapatkan orang yang ingin berkerja di luar negeri atau di luar daerah untuk selanjutnya akan dikirimkan kepada terdakwa Nelci Alveonitha Tfuakan dengan imbalan bagi yang merekrut akan memperoleh uang sebesar RP. 2.000.000.- (dua juta rupiah).
5. Saksi Rangki Dengak bertemu dengan saksi Eviana Tulle di sebuah acara peminangan, dalam sebuah obrolah pada intinya Elviana Tulle meminta tolong dicarikan perkerjaan oleh saksi Rangki Dengak. Setelah acara peminangan, saksi Elvina Tulle pulang ke rumah dan memberitahukan tentang keinginan nya untuk kerja di luar negeri yakni Malaysia kepada suaminya yaitu saksi Maksen Nifu dan mertuanya yaitu saksi Elisabeth Nifu. Ternyata koban yang bernama Damaris Nifu mendengar perbincangan itu dan juga berminat untuk kerja ke luar negeri. Setelah mendengar keinginan korban, saksi Elvina Tulle menghubungi saksi Rangki Dengak bahwa anak korban Damaris Nifu juga ingin berkerja. Kemudian saksi Rangki Dengak berencana ke rumah korban untuk menemui orang tua dari korban.
6. Sekitar jam 13.00 wita pada bulan juli tahun 2015, saksi Rangki Dengak menuju ke rumah orang tua dari korban yaitu bernama Yunus Nifu dan Yumina Nifu untuk menawarkan keinginannya membawa anak dari Yunus

Nifu dan Yumina Nifu untuk dipekerjakan. Namun orang tua dari korban menolak. Namun korban masih menginginkan untuk kerja di luar negeri, oleh karena itu saksi Rangki Dengak menanyakan perihal kepemilikan KTP (Kartu tanda Penduduk). Namun korban tidak memiliki dan sebagai gantinya korban disuruh menyiapkan KK (Kartu Keluarga) dan Surat Baptis untuk mengurus KTP.

7. Beberapa hari kemudian masih dalam bulan Juli tahun 2015 saksi Rangki Dengak dan menjemput korban dan menyuruh korban keluar terlebih dahulu menuju jalan besar agar tidak diketahui oleh orang tua korban, beberapa menit kemudian saksi Rangki Dengak mengikuti korban dari belakang dan membonceng korban menuju ke kostnya untuk menginap selama 1 malam.
8. Keesokan harinya korban dijemput oleh saksi Anton Nalle untuk diantar menuju kos terdakwa Nelci Alveonitha Tfuakan. Setiba di kos terdakwa, terdakwa melihat bekas luka pada korban, sehingga terdakwa memberitahu pada korban bahwa korban tidak dapat berkerja ke luar negeri karena lukanya itu, kemudian terdakwa menyuruh Anton Nalle untuk membawa korban ke klinik kesehatan untuk dibuatkan Surat Keterangan Kesehatan, setelah itu dibawa menuju kos terdakwa dan bertemu dengan saksi Ester Kolo yang sebelumnya sudah berada di kos terdakwa.
9. Bahwa saat korban dan saksi Ester Kolo ditampung di rumah terdakwa, terdakwa menelpon Wahyuni untuk mengirimkan sejumlah uang untuk dipergunakan sebagai tiket keberangkatan korban dan saksi Ester Kolo, juga sebagai fee kepada terdakwa, termasuk juga saksi Anton Nalle dan Rangki

Dengak. Lalu Wahyuni mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali yakni pada 27 Juli 2015, saksi Wahyuni mentransfer uang sejumlah Rp. 10.120.000.- dan pada tanggal 28 Juli 2015 mentransfer lagi sejumlah Rp. 1.500.000.- kepada terdakwa.

10. Setelah mendapat transferan terdakwa menghubungi saksi Yohanis Leonardus Ringgi yang merupakan petugas bandara Eltari Kupang untuk membantu proses pengiriman korban, korban membuat Surat Keterangan Domisi, Surat Keterangan Bepergian dan Surat Ijin Orang Tua yang ditandatangani oleh kepala desa Nonbaun, Yustinus Tfuakan, SH. Korban dijanjikan oleh terdakwa akan memperoleh gaji sebesar 1.000.000.- setiap bulannya.
11. Pada pukul 11.05 wita, korban dan saksi Ester Kolo berangkat menuju Medan dengan menggunakan pesawat Lion Air dan di jemput oleh saksi yaitu Johan Joyadi, untuk kemudian di bawa kerumahnya untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.
12. Korban bekerja di rumah saksi Johan Jayadi selama 8 (delapan) bulan, namun tidak menerima gaji. Pada bulan Februari 2016 korban ketahuan menggunakan telepon genggam untuk menghubungi keluarganya di Kupang, dan karena hal itu saksi Johan Jayadi mengirimkan korban ke Banda Aceh untuk bekerja sebagai penjaga toko di tempat saksi Lindawaty. Secara keseluruhan yaitu 8 (delapan) bulan di tempat saksi Jayadi dan 6 (enam) bulan di tempat saksi Lindawaty korban tidak pernah menerima gaji,

Adapun pada saat proses pembuktian, Jaksa Penuntut Umum mengajukan beberapa saksi di bawah sumpah sejumlah 14 orang yaitu:⁴

Damarus Nifu, Yunus Nifu, Yumima Nifu-Lalus, Elviana Tulle, Maksen Nifu, Elisabet Nifu, Santi Manu, Ester Kolo, Sherly Tumbonat, Titus Mananel, Jostinus Tfuakan, Yohanis Leonard Ringgi, Rangki Dengak, Anthon Nalle.

Pada tanggal 29 Juli 2015, sekitar pukul 12.00 wita di Oelalai desa Baumata timur Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang terdakwa melakukan perdagangan orang. Berawal dari dari anak korban yang ingin bekerja keluar negeri, kemudian anak korban mendapatkan informasi saksi Elviana Tulle juga hendak bekerja ke luar negeri, lalu anak korban memberitahukan kepada saksi Elviana Tulle bahwa anak korban juga berkeinginan bekerja di luar negeri, lalu sanksi Elviana Tulle memberitahuka kepada saksi Rangki Dengak, dan saksi Rangki Dengaak mendatangi rumah saksi Elisabet Nifu dan Elviana Tulle untuk bertemu

[illegible]

dengan orang tua korban. Ketika diberitahu bahwa saksi Rangki Dengak hendak membawa anak korban ke luar negeri, orang tua korban menolaknya.

Pada tanggal 29 Juli Rangki Dengak bersama dengan saksi Helena Liu mendatangi rumah saksi Elisabet Nifu di Oelalali kemudian bertemu dengan anak korban lalu saksi Rangki Dengak menanyakan kepada anak korban menyangkut surat-surat yang dibawa anak korban, apakah sudah lengkap dengan membawa Surat Baptis dan Kartu Keluarga korban. Selanjutnya saksi Rangki Dengak menyuruh korban berjalan keluar dari rumah terlebih dahulu dan menuju jalan keluar, tidak beberapa lama saksi Rangki Dengak mengikuti korban dan menyuruh korban untuk menaiki motor dari saksi Rangko Dengak.

Setelah tiba di kost saksi Rangki Dengak, keesokan harinya yakni pada tanggal 30 Juli 2015 korban dijemput oleh saksi Anto Nalle dan korban dibawa oleh saksi Anto Nalle menuju tempat dari terdakwa di Bomepu Kelurahan Lasiana, lalu terdakwa melihat bahwa kaki anak korban terluka kemudian terdakwa memberitahukan kepada korban, bahwa tidak dapat bekerja ke luar negeri karena adanya luka dari korban. Setelah menginap salam 2 (dua) malam di rumah terdakwa, kemudian pada tanggal 1 Agustus 2015 sekitar jam 09.00 wita, korban di antar oleh terdakwa menggunakan mobil yang dikendarai oleh bang Yoram menuju bandara El Tari Kupang.

Sesampainya di Medan korban di jemput oleh saksi Johan Jayadi, korban bekerja bersama-sama dengan saksi Ester Kolo dan pekerjaan yang

Bahwa benar majukan dari Olivi Lopez mengirim uang kepada terdakwa sebanyak 3 kali, yang pertama pada tanggal 27 Juli 2015 sejumlah Rp. 10.120.000,-(Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang kedua pada tanggal 28 Juli 2015 sejumlah Rp. 1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 03 Agustus 2015 sejumlah Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Saksi ahli yang dihadirkan dalam perkara ini adalah saksi Roni Elias Idje, S.H. yang merupakan Pengawas Ketenagakerjaan di Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur, menurut ahli perekrutan terhadap korban Damaris Nifu yang masih berusia 16 tahun yang diberangkatkan ke Medan sebagai Pembantu Rumah Tangga, tanpa melalui instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan ataupun lembaga swasta yang berbadan hukum sah menurut peraturan ketenagakerjaan. Selama korban bekerja tidak pernah digaji baik oleh Johan Jayadi maupun Landiawati, hingga korban dijemput oleh polisi dari Polres Kupang.

[illegible]

3. Bukti Surat

Beberapa barang bukti surat yang diajukan pada saat proses persidangan perkara ini yaitu:⁶

- a. Lembar surat baptis gereja
- b. Lembar kartu keluarga
- c. Surat Izin Mengendarai (SIM C)
- d. Buku tabungan
- e. Buku kwitansi
- f. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- g. Paspor
- h. Surat ijin orang tua palsu
- i. Surat ijin jalan palsu

4. Bukti Petunjuk

Beberapa barang bukti petunjuk yang diajukan dalam proses persidangan perkara ini yaitu:⁷

- Handphone
- Buku tulis

5. Keterangan Terdakwa

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipersidangkan, didengarkan pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Olm, 77

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Olm, 79

⁹Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 4/Pid.Sus/2017/PN Olm, 72.

1. Unsur setiap orang

Adapun dalam perkara ini telah terungkap dalam fakta persidangan bahwa yang menjadi subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa Nelci Alveonitha Tfuakan sebagaimana surat dakwaan dan saksi-saksi tidak menyangkalnya. Berdasarkan pertimbangan itu unsur pertama sudah terpenuhi.

[illegible]

Hakim mempertimbangkan sebagaimana menurut tujuan hukum pidana, pemidanaan yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, akan tetapi agar terdakwa tersebut dapat menyadari kesalahan yang dibuatnya dengan harapan agar terdakwa sadar dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, di samping itu pemidanaan juga mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga menutup kemungkinan orang lain untuk melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh terdakwa.

Sebelum menjatuhkan hukuman hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, keadaan yang memberatkan yaitu; perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantasi tindak pidana perdagangan orang. Selain itu hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu; terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan terdakwa bersikap sopan dipersidangan¹².

[illegible]

kesalahan tentang orang yang diajukan dalam persidangan (*“error in persona”*) Dalam kasus ini terungkap bahwa Nelci Alveonitha Tfuakan ditetapkan sebagai terdakwa.

Adanya unsur yang kedua yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang. Adapun yang di maksud dengan perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya (Vide Pasal 1 angka 9 UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Dalam kasus ini terdakwa tidak sendiri, melainkan menyuruh Anton Nalle kemudian Anton Nalle menyuruh Rangki Dengak untuk mencari orang untuk dipekerjakan di Medan.

Selanjutnya terdapat unsur eksploitasi yang terjadi dalam kasus perdagangan orang ini, sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa dalam melakukan perekrutan terhadap korban yakni sejumlah Rp.1.820.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah). Dengan pertimbangan itu maka unsur alternatif sudah terpenuhi.

Selain itu pula terdapat unsur yang dilakukan terhadap anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk juga anak yang masih berada di dalam kandungan (vide Pasal 1 angka 5 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Dalam kasus ini ditemukan fakta dalam persidangan bahwa berdasarkan surat Baptis Nomor Seri A No 121547 ditandatangani oleh

Selanjutnya dikenal alasan pemaaf yang menyebabkan dihapusnya hukuman, yang dalam hukum Islam disebut (*asbab rafi'i al-uqubah*) terjadi manakala keadaan si pelaku tidak mungkin dilaksanakannya hukuman. Di dalam hukum Islam terdapat 4 (empat) sebab dapat menghapuskan hukuman.⁶ *Pertama* paksaan, para fuqaha berpendapat bahwa dalam paksaan harus ada perbuatan material yang didahului oleh perbuatan penyiksaan kepada orang yang dipaksa. *Kedua* mabuk, dalam Islam mabuk sangat dilarang karena sifat pekerjaannya di sengaja. Namun yang dimaksudkan dengan mabuk adalah hilangnya akal sehat. *Ketiga* gila, artinya pertanggungjawaban pidana diberikan kepada seorang mukallafa yang memiliki kemampuan dalam berpikir dan pilihan dalam berbuat.

⁶ Ibid, 116

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Oleh karena itu jika penambahan 1/3 pada pasal 17 diterapkan, maka ancaman hukuman bagi pelaku perdagangan orang yang menjadikan anak sebagai korbanya adalah pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan paling banyak 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Dalam perkara ini hakim memberikan putusan kepada terdakwa yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 17 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan menghukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dari penjelasan sebagaimana di atas, tampak bahwa hakim Pengadilan Negeri Oelamasi menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus ketentuan Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 17 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam menjatuhkan putusan, umumnya hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Apabila ada hal yang memberatkan, maka pidana yang dijatuhkan melebihi dari ancaman pidana minimum khusus. Sebaliknya, apabila terdapat hal yang

Dalam menjalankan kejahatannya terdakwa tidak bertindak sendiri melainkan dibantu oleh terdakwa lain yaitu Rangki Dengak dan Anton Nalle yang didakwa dalam penuntutan terpisah. Maka hukuman sebagaimana

¹⁶Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 82-83

ketentuan dalam pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu kepada orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dikenakan hukuman yang sama, dalam kasus ini terdakwa Nelci Alveonitha Tfuakan melakukan kerjasama dengan menyuruh saksi Rangki Dengak dan Anton Nalle dalam membantu mencari orang untuk dipekerjakan.

Fakta persidangan menunjukkan terdapat uang sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa kepada 2 (dua) orang yang membantunya sebagai tanda kesepakatan. Dengan demikian, dalam kasus ini masuk dalam kategori turut serta berbuat *jarimah* tidak langsung (*al-ishtirāk bi al-tasbbub*) karena dilakukan dengan memberikan bantuan berupa perbuatan dengan disertai kesepakatan dan kesengajaan.

Islam memberikan perlindungan khusus kepada anak kecil bukan hanya sejak lahir di dunia bahkan sejak ia berada di dalam kandungan ibunya sampai pada usia dewasa. Adapun menurut hukum Islam dijelaskan ada 3 (tiga) fase yang dilalui oleh manusia sejak lahir sampai dengan dewasa yaitu;¹⁷ fase belum adanya kemampuan berfikir (*mumayyiz*), fase kemampuan berfikir lemah dan fase kesuatan berfikir penuh. Adapun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia kecerdasan dalam berfikir penuh adalah ketika menginjak usia 18 tahun bagi anak-anak dan 17 tahun bagi perempuan.

Perdagangan manusia seperti perbudakan anak sudah dihapus dalam hukum Islam karena dianggap merusak hak dasar manusia dan hak Allah

¹⁷Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang berkaitan dengan Aktifitas Anak*, (Jakarta: Al-Mawardi, 2004).h vi

Dalam perkara ini, kewenangan sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim untuk memberikan putusan berdasarkan *ijtihad*. Adapun hukuman *ta'zir* yang sesuai untuk terdakwa yaitu hukuman *ta'zir* berupa penjara, persoalan lamanya waktu hukuman atau kadar hukumannya menurut ulama Hanbali dan Syafi'i merupakan kewenangan dari Ulil Amri. .

Selain memberikan sanksi pokok yang dapat berupa pidana kurungan maupun penjara, hakim sebagai Ulil Amri juga diberikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara dengan memberikan saksi tambahan berupa denda.

Sehingga dapat dipahami, bahwa sanksi *ta'zir* terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang diserahkan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman sesuai dengan *jarimah* yang dilakukan, dengan tetap mempertahankan tujuan demi kemaslahatan umum. Meskipun saksi *ta'zir* diserahkan kepada hakim, namun hakim harus mempertimbangkan banyak hal, sehingga tidak melampaui batas atau kurang dari batas minimum hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mencermati uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan untuk menjawab dari rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Olm, Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2017 tentang pemberantasan tindak pidana orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim mempertimbangkan unsur-unsur pidana, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari pelaku, Dalam pertimbangannya hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf menurut Hukum Pidana Islam, sehingga pelaku ditetapkan sebagai *mukalaf* dan mampu dalam pertanggungjawaban pidana .Hakim berkesimpulan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah). Adapun pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, berada di bawah minimal khusus Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Putusan belum sepenuhnya memenuhi kepastian hukum, karena secara yuridis normatif tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Al- Mawardi. *al-Ahkam as-Sulthaniyah*. Kairo: dar An- Nahdhah, 1987.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta:Sinar Grafika, 2012.
- Ardhiarini, Rizky. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Putusan Nomor:141/Pid.Sus/2018/PN.Kwg”. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Boukhari (al), Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail. *Sahih Al-Boukhari Juz 3*. Beirut: Dar Al-Kitab Al- A’raby, 1993.
- CH, Mufidah *Mengapa Mereka Diperdagangkan ?: Membongkar Kejahatan Trafficking dalam prespektif islam, Hukum dan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.
- Dama, Alfred. “Ibukota Kabupaten Kupang, Oelamasi cocok disebut kampung besar”,<https://kupang.tribunnews.com/amp/2016/04/04/ibukota-kabupaten-kupang-oelamasi-cocok-disebut-kampung-besar>, diakses pada 01 Maret 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014.
- Ditjen PP Kemenkumham. Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Ditjen PP Kemenkumham. Undang-Undang No 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- Ditjen PP Kemenkumham. Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Dzazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, t.tp,t.p

- Kurnia, Andi. "Analisis Hukum Pidana Islam dan Pidana Positif terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr tentang Perdagangan Orang". Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Najahan, Muh. Rohis. *Tindak Pidana Perdagangan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: UINSUKA, 2009.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Nasution, Muhammad Syukuri Albani. *Filsafat Hukum Islam*, Ed. I; Cet, II; Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Nuraeny, Henny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Nurhayati. *Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang dalam perspektif ulama*. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Nurul Irfan, Masyrofah. *Fiqh Jinayah* Jakarta: Pena Grafika, 2016.
- Prdjodikoro. Wirjono *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. t.tp,: PT Refika Aditama t.t.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Penulisan Skripsi* Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fiqh Sunnah*. Depok: SenjaMediaUtama, 2017.
- Sahara, Vidia Nabilla. "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Ratu Spa Medan. Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn" Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

- Suharudin, Yohanes. “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 25, No. 3, Juli 2007.
- Tholib Efendi. Tholib *Pratik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press, 2016.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Yafie, Alie. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2000.
- Yanggo, Huzaemah. *Fiqih Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang berkaitan dengan Aktifitas Anak*. Jakarta: Al-Mawardi, 2004.
- Zad, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004.